

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Sumatera Selatan

4.1.1 Luas dan Batasan Wilayah Administrasi



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019.

Gambar 4.1 Peta Provinsi Sumatera Selatan

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Selatan pulau Sumatera. Letak geografis Sumatera Selatan berbatasan dengan provinsi Jambi di Utara, provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Timur, provinsi Lampung di Selatan dan provinsi Bengkulu di Barat. Sumatera Selatan kaya akan sumber daya alam seperti Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Alam. Wilayah administrasi Sumatera Selatan terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota. Kondisi tersebut dijelaskan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Luas Wilayah, Kecamatan dan Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

| No | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Luas (Km ²) |
|------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 1 | Musi Banyuasin | 15 | 13 | 14.453,04 |
| 2 | Ogan Komering Ulu | 13 | 14 | 3.749,36 |
| 3 | Muara Enim | 20 | 10 | 6.757,86 |
| 4 | Lahat | 24 | 18 | 4.226,34 |
| 5 | Musi Rawas | 14 | 13 | 6.114,01 |
| 6 | Ogan Komering Ilir | 18 | 13 | 17.024,47 |
| 7 | Banyuasin | 21 | 16 | 12.472,33 |
| 8 | Ogan Komering Ulu Timur | 20 | 7 | 3.428,74 |
| 9 | Ogan Komering Ulu Selatan | 19 | 7 | 4.341,64 |
| 10 | Ogan Ilir | 16 | 14 | 2.268,22 |
| 11 | Empat Lawang | 10 | 9 | 2.320,5 |
| 12 | PALI | 5 | 6 | 1.743,56 |
| 13 | Musi Rawas Utara | 7 | 7 | 5.946,26 |
| 14 | Palembang | 18 | 107 | 366,48 |
| 15 | Prabumulih | 6 | 25 | 476,8 |
| 16 | Pagar Alam | 5 | 35 | 630,83 |
| 17 | Lubuklinggau | 8 | 72 | 380,26 |
| Sumatera Selatan | | 239 | 386 | 86.700,68 |

Sumber: BPS Sumatera Selatan

Kabupaten/kota dengan wilayah terluas adalah Ogan Komering Ilir yaitu 17,024.47 Km². Wilayah terluas selanjutnya adalah Musi Banyuasin dengan luas 14.453,04 Km². Sedangkan kabupaten/kota dengan luas wilayah terkecil adalah Palembang dengan luas 380,26 Km². Sumatera Selatan memiliki 239 kecamatan dan 386 kelurahan yang tersebar di masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki kecamatan paling banyak adalah Lahat dengan 24 kecamatan dan yang paling sedikit adalah PALI dan Pagar Alam yaitu 5 kecamatan. Kemudian Palembang sebagai pusat provinsi memiliki kelurahan paling banyak yaitu 107 kelurahan dan PALI sebagai kabupaten/kota yang memiliki kelurahan yang paling sedikit yaitu 5 kelurahan.

4.1.2 Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja

Dalam perekonomian jumlah penduduk dan angkatan kerja menjadi salah satu faktor penentu dalam aktifitas ekonomi. Penduduk merupakan semua orang yang menetap atau berdomisili di suatu wilayah minimal 6 bulan atau lebih dengan tujuan menetap. Jumlah penduduk di Sumatera Selatan pada tahun 2018 mencapai 8.391.489 jiwa. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Palembang yaitu sebanyak 1.651.857 jiwa. Kemudian Banyuasin dengan jumlah penduduk sebanyak 846.269 jiwa. Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terendah adalah Pagar Alam yaitu sebesar 137.964 jiwa.

Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja atau usia 15 tahun keatas yang bekerja, memiliki pekerjaan namun sedang tidak bekerja dan pengangguran.. Pada tahun 2018, Sumatera Selatan memiliki total angkatan kerja sebesar 4.138.957 jiwa. Kemudian jumlah angkatan kerja di Sumatera Selatan pada tahun 2018 sebanyak 4.138.957 jiwa. Palembang merupakan kota di Sumatera Selatan yang memiliki jumlah angkatan kerja tertinggi yaitu 742.356 jiwa. Kemudian Ogan Komering Ilir yaitu sebanyak 413.021 jiwa. Sedangkan kabupaten/kota dengan angkatan kerja terendah adalah Pagar Alam yaitu sebanyak 72.686 jiwa.

Jika dikaitkan antara jumlah penduduk dan luas wilayah kabupaten/kota yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi adalah Palembang yaitu dengan jumlah penduduk sebanyak 1.651.857 jiwa dengan luas wilayah sebesar 366,48 Km². Kemudian Ogan Komering Ulu sebagai kabupaten/kota yang kepadatan penduduknya paling rendah yaitu dengan jumlah penduduk sebanyak 364.260

jiwa dengan luas wilayah 14.453,04 Km². Kondisi tersebut dijelaskan pada Tabel

4.2

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota Tahun 2018

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | Jumlah Angkatan Kerja (jiwa) |
|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 364.260 | 174.900 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 821.528 | 413.021 |
| 3 | Muara Enim | 628.661 | 323.200 |
| 4 | Lahat | 405.605 | 218.800 |
| 5 | Musi Rawas | 400.239 | 213.510 |
| 6 | Musi Banyuasin | 640.065 | 293.029 |
| 7 | Banyuasin | 846.269 | 398.036 |
| 8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 358.510 | 196.769 |
| 9 | Ogan Komering Ulu Timur | 670.653 | 346.215 |
| 10 | Ogan Ilir | 424.774 | 222.874 |
| 11 | Empat Lawang | 247.544 | 131.670 |
| 12 | PALI | 187.554 | 95.926 |
| 13 | Musi Rawas Utara | 190.222 | 91.804 |
| 14 | Palembang | 1.651.857 | 742.346 |
| 15 | Prabumulih | 185.895 | 92.556 |
| 16 | Pagar Alam | 137.964 | 72.686 |
| 17 | Lubuklinggau | 229.889 | 111.615 |
| | Sumatera Selatan | 8.391.489 | 4.138.957 |

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2019.

Sumatera Selatan memiliki persentase penduduk miskin sebesar 12,80 persen jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,39. Maka dari itu, Sumatera Selatan tergolong Provinsi yang memiliki tingkat IPM tinggi. Artinya masyarakat di Sumatera Selatan sejahtera. Hal ini dikarena hampir mencapai angka 70. IPM suatu daerah sangat mempengaruhi perkembangan wilayah tersebut. Angka IPM yang tinggi menyatakan bahwa kehidupan masyarakat sejahtera. Kemudian, merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Selain itu,

angka IPM mampu menunjukkan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Miskin dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2018 (dalam persen)

| No | Kabupaten/Kota | Penduduk Miskin | Indeks Pembangunan Manusia |
|----|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 12,61 | 69,01 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 15,28 | 66,57 |
| 3 | Muara Enim | 12,56 | 68,28 |
| 4 | Lahat | 16,15 | 66,99 |
| 5 | Musi Rawas | 13,76 | 66,18 |
| 6 | Musi Banyuasin | 16,52 | 67,57 |
| 7 | Banyuasin | 11,32 | 66,4 |
| 8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 10,64 | 64,84 |
| 9 | Ogan Komering Ulu Timur | 10,57 | 68,58 |
| 10 | Ogan Ilir | 13,19 | 66,43 |
| 11 | Empat Lawang | 12,25 | 64,81 |
| 12 | PALI | 13,81 | 63,49 |
| 13 | Musi Rawas Utara | 19,12 | 63,75 |
| 14 | Palembang | 10,95 | 77,89 |
| 15 | Prabumulih | 11,39 | 74,04 |
| 16 | Pagar Alam | 8,77 | 67,62 |
| 17 | Lubuklinggau | 13,02 | 74,09 |
| | Sumatera Selatan | 12,80 | 69,39 |

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2019.

Provinsi Sumatera Selatan terdapat 17 kabupaten/kota yang tersebar dan berbatasan satu sama lain. Tabel 4.3 menunjukkan Kabupaten/kota dengan IPM tertinggi adalah Palembang yaitu sebesar 77, 89. Lalu, diikuti oleh Lubuklinggau dengan IPM sebesar 74,09. Sedangkan kabupaten/kota dengan IPM terendah adalah PALI yaitu sebesar 63,49.

Beralih ke persentase kemiskinan, kabupaten/kota dengan persentase kemiskinan terendah adalah Pagar Alam yaitu 8,77 persen yang artinya tingkat penduduk miskin di wilayah tersebut relatif rendah. Sedangkan kabupaten/kota dengan angka penduduk miskin tertinggi adalah Musi Rawas Utara yaitu sebesar

19,12 persen yang artinya tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah tersebut masih relatif rendah karena tingkat penduduk miskinnya tinggi.

4.1.3 Infrastruktur Publik

Sumatera Selatan memiliki sejumlah infrastruktur publik baik itu berupa infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial yang bisa dinikmati masyarakat. Infrastruktur sosial dapat berupa sekolah dan rumah sakit. Sedangkan infrastruktur fisik dapat berupa jalan. Infrastruktur yang ada tentunya diperoleh dari anggaran masing-masing daerah yang telah tercantum dalam APBD Sumatera Selatan, khususnya untuk infrastruktur fisik berupa jalan telah tercantum dalam belanja modal per kabupaten/kota yang telah di bagikan sesuai porsinya dari APBD.

Infrastruktur sosial pertama berupa sekolah. Di Indonesia jumlah infrastruktur ini tersebar di masing-masing provinsi, khususnya Sumatera Selatan sejumlah sekolah tersebar di kabupaten/kota sesuai dengan tingkatnya yaitu dasar, menengah dan atas/kejuruan. Sumatera Selatan memiliki jumlah sekolah sebanyak 8.274 yang terbagi menjadi 5.233 untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), 1.864 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 872 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 305 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kabupaten/kota yang memiliki jumlah SD tertinggi adalah Banyuasin yaitu sebanyak 55 dan yang terendah adalah Prabumulih sebanyak 104. Untuk tingkat SMP, kabupaten/kota yang memiliki jumlah tertinggi adalah Palembang yaitu sebanyak 245, sedangkan yang terendah adalah Pagar Alam yaitu 32 SMP.

Pada tingkat SMA, Palembang juga menjadi kabupaten/kota dengan jumlah tertinggi yaitu sebanyak 139, sedangkan kabupaten/kota yang memiliki jumlah SMA paling sedikit adalah Pagar Alam yaitu sebanyak 15 sekolah. Pada tingkat SMK, kabupaten/kota yang memiliki jumlah terbanyak adalah Palembang yaitu sebanyak 79 dan Musi Rawas Utara dengan jumlah terendah yaitu 2 sekolah saja. Secara keseluruhan kabupaten/kota dengan total sekolah terbanyak adalah Banyuasin yaitu sebanyak 846 sekolah dan kabupaten/kota dengan jumlah sekolah paling sedikit adalah Pagar Alam yaitu hanya sebanyak 152 sekolah. Penjelasan ini jelaskan pada Tabel 4.4.

Selanjutnya infrastruktur sosial kedua adalah Rumah Sakit. Sumatera Selatan memiliki total 71 Rumah Sakit yang tersebar di kabupaten/kota. Dalam penelitian ini, rumah sakit yang ditampilkan hanya rumah sakit umum karena terdapat banyak sekali jenisnya. Pada Tabel 4.4 ditampilkan jumlah rumah sakit di masing-masing kabupaten/kota. Palembang sebagai ibukota provinsi Sumatera Selatan memiliki jumlah rumah sakit terbanyak yaitu 34. Sedangkan Ogan Komering Ulu Selatan, Empat Lawang, PALI, Musi Rawas Utara dan Pagar Alam hanya memiliki masing-masing 1 rumah sakit. Tentunya jumlah ini sangat sedikit dan perlu ditambah agar dapat memenuhi kebutuhan publik dalam layanan kesehatan.

Kemudian, untuk infrastruktur fisik salah satunya adalah jalan. Dalam penelitian ini data yang dipilih adalah data jalan raya. Dalam penelitian dicantumkan panjang jalan yang ada di kabupaten/kota di Sumatera Selatan seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 4.4. Wilayah dengan jalan tertinggi adalah

Ogan Komering Ulu Timur yaitu sepanjang 205,75 Kilometer sedangkan yang terendah adalah Musi Rawas yaitu sepanjang 38 Kilometer. Dalam hal ini, Prabumulih dan Lubuklinggau menjadi kabupaten/kota yang unik. Terdapat banyak sekali lintasan kereta api yang digunakan dalam aktifitas perekonomian atau angkutan batubara. Lintasan kereta api di sepanjang jalan ini yang menyebabkan jalan yang tercatat hanyalah lintasan rel kereta. Jalan raya terdata oleh dinas yang bersangkutan sehingga untuk panjang jalan tidak di catat atau dianggap tidak ada. kondisi ini ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Jumlah Sekolah, Rumah Sakit dan Panjang Jalan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

| No | Kabupaten/Kota | Sekolah | | | | Rumah Sakit | Panjang Jalan (Km) |
|------------------|---------------------------|---------|-------|-----|-----|-------------|--------------------|
| | | SD | SMP | SMA | SMK | | |
| 1 | Musi Banyuasin | 506 | 199 | 76 | 25 | 3 | 39,85 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 529 | 205 | 77 | 27 | 3 | 79,10 |
| 3 | Ogan Komering Ulu | 228 | 80 | 40 | 13 | 3 | 123,02 |
| 4 | Muara Enim | 424 | 138 | 54 | 19 | 2 | 172,10 |
| 5 | Lahat | 320 | 89 | 46 | 12 | 2 | 83,91 |
| 6 | Musi Rawas | 335 | 99 | 41 | 7 | 2 | 38 |
| 7 | Banyuasin | 558 | 191 | 97 | 20 | 2 | 50,14 |
| 8 | Ogan Komering Ulu Timur | 491 | 152 | 75 | 37 | 4 | 205,75 |
| 9 | Ogan Komering Ulu Selatan | 294 | 93 | 36 | 9 | 1 | 191,23 |
| 10 | Ogan Ilir | 283 | 123 | 55 | 16 | 4 | 167,20 |
| 11 | Empat Lawang | 192 | 42 | 18 | 4 | 1 | 93,61 |
| 12 | PALI | 131 | 54 | 30 | 10 | 1 | 108,30 |
| 13 | Musi Rawas Utara | 144 | 51 | 21 | 2 | 1 | 56,25 |
| 14 | Palembang | 474 | 245 | 139 | 79 | 34 | 57,30 |
| 15 | Prabumulih | 104 | 29 | 18 | 11 | 4 | - |
| 16 | Lubuklinggau | 115 | 42 | 34 | 8 | 3 | - |
| 17 | Pagar Alam | 105 | 32 | 15 | 6 | 1 | 47,9 0 |
| Sumatera Selatan | | 5.233 | 1.864 | 872 | 305 | 71 | 1.513,66 |

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2019

4.1.4 Gambaran Umum Variabel Penelitian

4.1.4.1 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk melihat apakah kinerja pembangunan ekonomi dalam rangka pertumbuhan ekonomi pada tingkat wilayah dapat terlaksana dengan baik. Selain itu PDRB menjadi salah satu alat ukur pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu daerah.

Tabel 4.5 Laju Pertumbuhan PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2018 (dalam persen)

| No | Kabupaten/Kota | 2017 | 2018 |
|------------------|---------------------------|------|------|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 4,06 | 5,00 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 5,11 | 5,01 |
| 3 | Muara Enim | 7,16 | 8,65 |
| 4 | Lahat | 4,44 | 4,07 |
| 5 | Musi Rawas | 5,03 | 5,81 |
| 6 | Musi Banyuasin | 3,02 | 3,23 |
| 7 | Banyuasin | 5,04 | 5,14 |
| 8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 4,51 | 5,16 |
| 9 | Ogan Komering Ulu Timur | 2,66 | 3,27 |
| 10 | Ogan Ilir | 5,14 | 5,26 |
| 11 | Empat Lawang | 3,17 | 4,28 |
| 12 | PALI | 5,97 | 6,43 |
| 13 | Musi Rawas Utara | 4,65 | 4,22 |
| 14 | Palembang | 6,21 | 6,69 |
| 15 | Prabumulih | 5,26 | 5,82 |
| 16 | Pagar Alam | 4,81 | 4,31 |
| 17 | Lubuklinggau | 6,31 | 6,01 |
| Sumatera Selatan | | 5,51 | 6,04 |

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2019.

Berdasarkan Tabel 4.5 pada tahun 2018 menunjukkan laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Sumatera Selatan mengalami peningkatan sebesar 0,53 persen dari tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2018 terdapat 4 kabupaten/kota

yang memiliki laju pertumbuhan PDRB di atas rata-rata laju pertumbuhan PDRB Sumatera Selatan yaitu Muara Enim, PALI, Palembang dan Lubuklinggau. Artinya 4 kabupaten/kota tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sedangkan kabupaten/kota yang laju pertumbuhan PDRB paling rendah di bawah rata-rata Sumatera Selatan adalah Musi Banyuasin yaitu 3,23 persen artinya pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin rendah.

Pada Tabel 1.2 menunjukkan total dari keseluruhan PDRB di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan tiap tahunnya memiliki rata-rata sebesar 18.196,85 milyar di tahun 2016, 19.621,74 milyar di tahun 2017 dan 24.848,39 di tahun 2018. Lalu, terdapat 5 kabupaten/kota yang memiliki rata-rata PDRB di atas rata-rata PDRB di provinsi Sumatera Selatan secara berurutan yaitu Palembang, Musi Banyuasin, Muara Enim, Ogan Komering Ilir, dan Banyuasin.

Palembang sebagai ibukota provinsi Sumatera Selatan memiliki 3 sektor utama penyumbang PDRB yaitu sektor industri pengolahan sebesar 32,09 persen sebagai sektor primer, lalu untuk sektor sekundernya yaitu konstruksi sebesar 18,39 persen dan sektor tersier berupa perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,71 persen. Dilihat dari letak geografisnya yang memiliki luas wilayah paling sempit di provinsi Sumatera Selatan, industri pengolahan seperti industri souvenir dan industri kuliner yang menyerap banyak pekerja menjadi lapangan usaha yang cocok untuk Palembang.

Selanjutnya, Musi Banyuasin sebagai kabupaten yang urutan kedua setelah Palembang dengan nilai rata-rata PDRB di atas rata-rata PDRB Sumatera Selatan. Musi Banyuasin didominasi oleh pertambangan dan penggalan sebesar 54,53

persen sebagai sektor primer. Jumlah tersebut tentunya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Banyuasin. Untuk sektor sekundernya yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 11,73 persen, dan sektor tersier berupa industri pengolahan sebesar 9,87.

Sama halnya dengan Musi Banyuasin, Muara Enim juga didominasi oleh pertambangan dan penggalian sebesar 55,07 persen sebagai sektor primer. Selanjutnya, industri pengolahan sebesar 14,08 persen sebagai sektor sekunder dan pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 9,90 sebagai sektor tersier. Muara Enim menjadi kabupaten dengan sektor sektor dominan berupa pertambangan dan penggalian tertinggi di Sumatera Selatan pada tahun 2018.

Sektor dominan disebabkan oleh letak geografisnya yang memiliki banyak titik penggalian dan pertambangan berupa minyak bumi, batu bara dan gas alam dibandingkan kabupaten/kota lainnya di provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini juga dijadikan sebagai kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi provinsi Sumatera Selatan tahun 2017.

Berbeda dengan dua kabupaten sebelumnya, lapangan usaha di Ogan Komering Ilir didominasi oleh pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 55,02 persen. Untuk sektor sekundernya adalah konstruksi sebesar 13,37 persen dan sektor tersier yaitu perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,38 persen. Apabila dilihat dari letak geografisnya yang memiliki wilayah terluas di provinsi Sumatera Selatan yaitu 17.024,47 Km², Ogan Komering Ilir sangat cocok untuk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Sejalan dengan Ogan Komering Ilir, Banyuasin juga didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 33,31 persen kemudian sektor keduanya adalah industri pengolahan sebesar 25,72 persen dan sektor tersiernya yaitu perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,90 persen.

Dilihat keseluruhan kabupaten/kota yang memiliki rata-rata PDRB di atas rata-rata PDRB Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa sektor dominan yang menopang tingginya PDRB di Sumatera Selatan adalah Pertambangan dan penggalian, Peternakan, kehutanan dan perikanan, Industri pengolahan, dan Kontruksi serta Perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor.

Sedangkan, kabupaten/kota dengan rata-rata PDRB terendah dibandingkan rata-rata provinsi Sumatera Selatan adalah Pagar Alam. Data distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan Pagar Alam memiliki sektor primer yaitu Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22,77 persen. Untuk sektor sekunder yaitu perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 19,39 persen dan sektor tersier yaitu kontruksi sebesar 17,13 persen.

Rendahnya PDRB Pagar Alam dikarenakan banyaknya lahan pertanian yang dibuka untuk pemukiman masyarakat, padahal lapangan usaha pertanian merupakan penyumbang terbesar perekonomian Pagar Alam. Akibatnya lahan yang biasanya digunakan untuk pertanian menurun luasnya dan perkembangan harga pada sektor pertanian memiliki peluang kecil sehingga masyarakat beralih

ke sektor lain sehingga terjadi penurunan pada bidang pertanian, kehutanan dan perikanan.

4.1.4.2 Perkembangan Belanja Pegawai Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Belanja Pegawai merupakan belanja yang ditujukan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan rutin suatu instansi pemerintah, sebagaimana dalam tujuan pokok dan fungsinya. Pada beberapa provinsi di Indonesia khususnya Sumatera Selatan, belanja pegawai memiliki porsi terbesar dalam struktur belanja daerah yang anggarannya bersumber dari APBD. Belanja pegawai provinsi Sumatera Selatan digunakan untuk pengeluaran honorium/upah dalam melaksanakan program kegiatan pemerintah daerah, termasuk di dalamnya gaji pegawai yang bersifat rutin dan tunjangan lainnya baik pegawai tetap maupun honor.

Selain itu, belanja pegawai juga di alokasikan untuk belanja gaji dokter pegawai tidak tetap, belanja uang tunggu dan pensiun PNS, belanja pegawai honorer, pembayaran uang vakasi, belanja asuransi kesehatan PNS, belanja makan PNS, belanja uang lauk pauk TNI/POLRI, belanja pegawai transito dan pembayaran tunjangan khusus serta pembayaran untuk uang duka wafat.

Jumlah PNS di provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat sebanyak 698 orang. Pada Tabel 4.6 menunjukkan kabupaten/kota dengan jumlah PNS tertinggi adalah Ogan Komering Ilir yaitu 8.416 orang di tahun 2017 dan 8.028 orang di tahun 2018. Walaupun terjadi penurunan tahun

sebelumnya sebanyak 388 orang, tetapi jumlah PNS di Ogan Komering Ilir memiliki jumlah paling banyak dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Sebaliknya, untuk kabupaten/kota dengan jumlah PNS terendah adalah PALI yaitu 1.455 orang di tahun 2017 dan 1.748 orang di tahun 2018. Meskipun jumlah PNS PALI paling rendah daripada kabupaten/kota lainnya. Namun, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 293 orang dan tergolong tinggi jika dikaitkan dengan wilayah administratif PALI yang merupakan hasil pemekaran kabupaten Muara Enim pada tahun 2014.

Berikutnya, jumlah PNS yang tercatat di Musi Rawas Utara hanya pada tahun 2018 saja yaitu sebanyak 1.765 orang, sedangkan pada tahun 2017 belum tercantum. Hal ini dikarenakan Musi Rawas Utara merupakan terbaru di Sumatera Selatan dan masih membutuhkan banyak penyesuaian agar data yang ada bisa ditampilkan secara valid.

Pada Tabel 1.3 dapat dilihat perkembangan belanja pegawai memiliki jumlah yang variatif di tiap kabupaten/kota. Namun, untuk porsinya masih mengalami ketimpangan dan perlu perhatian khusus agar jumlahnya lebih disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota. Mengingat hal itu, perekrutan jumlah PNS kiranya dapat di cermati sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah agar tidak terjadi kelebihan dana hanya untuk biaya perekrutan PNS saja. Jumlah kabupaten/kota yang ada di provinsi Sumatera Selatan juga menjadi satu faktor persebaran dan perekrutan PNS kian meningkat. Pada Tabel 4.6 ditunjukkan bahwa jumlah PNS pada tahun 2017 mencapai 88.708 orang dan terus meningkat di tahun 2018 menjadi 89.409 orang.

Tabel 4.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2018

| No | Kabupaten/Kota | 2017 | 2018 |
|------------------|---------------------------|--------|--------|
| 1 | Musi Banyuasin | 7.612 | 7.398 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 8.416 | 8.028 |
| 3 | Ogan Komering Ulu | 5.992 | 5.704 |
| 4 | Muara Enim | 7.131 | 7.465 |
| 5 | Lahat | 7.080 | 6.761 |
| 6 | Musi Rawas | 6.046 | 5.946 |
| 7 | Banyuasin | 7.848 | 7.403 |
| 8 | Ogan Komering Ulu Timur | 7.376 | 7.051 |
| 9 | Ogan Komering Ulu Selatan | 5.337 | 5.273 |
| 10 | Ogan Ilir | 5.608 | 5.312 |
| 11 | Empat Lawang | 2.844 | 3.049 |
| 12 | PALI | 1.455 | 1.748 |
| 13 | Musi Rawas Utara | - | 1.765 |
| 14 | Palembang | 5.634 | 5.546 |
| 15 | Prabumulih | 3.793 | 3.765 |
| 16 | Lubuklinggau | 3.268 | 4.081 |
| 17 | Pagar Alam | 3.268 | 3.111 |
| Sumatera Selatan | | 88.708 | 89.406 |

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2019.

Selain menggaji PNS, belanja pegawai juga digunakan untuk menggaji aparatur negara lainnya yang statusnya mengabdikan pada negara seperti Kepolisian, Tentara dan aparatur lainnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kecuali, untuk pekerjaan yang berkaitan dengan modal dan keluaran atau kegiatan yang memiliki keluaran dalam kategori belanja barang.

4.1.4.3 Perkembangan Belanja Barang Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Belanja Barang merupakan bagian dari belanja operasi yang memiliki nilai tertinggi setelah belanja pegawai. Perkembangan Belanja Barang di provinsi Sumatera Selatan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Sesuai dengan

fungsinya yaitu untuk pembelian barang/jasa habis pakai yang dimanfaatkan pada proses produksi barang/jasa yang dipasarkan atau pun tidak, di setiap provinsi khususnya di Sumatera Selatan tentu mengalami kenaikan pada belanja barang. Hal ini dikarenakan untuk menunjang kinerja dari pemerintahan wilayah itu sendiri

Peningkatan rasio belanja barang pada tahun 2018 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.4 meningkat sebanyak 2,3 persen dari tahun sebelumnya. Berbeda dengan rasio belanja pegawai yang mengalami penurunan pada tingkat kabupaten/kota, pada belanja barang terjadi peningkatan sebanyak 2,2 persen pada skala nasional di tahun 2018.

4.1.4.4 Perkembangan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Perkembangan Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan nilai belanja operasi lainnya. Namun untuk jumlahnya terus mengalami peningkatan, hanya saja porsi nya tiap daerah masih timpang.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/Pmk.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran, belanja modal yang dikeluarkan pemerintah meliputi belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan aset lainnya

Seperti yang telah ditampilkan pada Tabel 4.4 Jumlah Sekolah sudah terbilang cukup banyak dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan di tiap kabupaten/kota. Kemudian pembangunan infrastruktur jalan umum di tiap

kabupaten/kota juga sudah cukup memadai. Hanya saja untuk penyediaan Gedung rumah sakit harus diperhatikan lagi karena jumlah yang minim di tiap kabupaten/kota menyebabkan kekhawatiran di bidang kesehatan. Selain itu, jumlah rumah sakit terbanyak hanya terpusat pada Palembang yaitu sebanyak 34 rumah sakit. Kemudian, kabupaten yang memiliki rumah sakit terbanyak setelahnya adalah Ogan Ilir dan Prabumulih yaitu sebanyak 4 rumah sakit tetapi jumlah tersebut masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah rumah sakit yang ada di Palembang.

Pada Tabel 1.1 ditunjukkan perbandingan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah di kabupaten/kota pada tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 1,2 persen dari tahun 2017. Penurunan tersebut jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan penurunan pada tingkat nasional yang hanya 0,8 persen.

4.2 Hasil Estimasi PDRB Terhadap Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Terdapat tiga model yang dapat digunakan untuk mengestimasi data panel, yaitu: *Common Effect Model: Pooled Least Square*, *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)*.

Berdasarkan hasil estimasi seperti pada Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa dengan menggunakan *Common Effect Model*, koefisien variabel belanja pegawai, secara statistik signifikan dengan nilai probabilitas di bawah dari taraf alpha (5%), sedangkan variabel PDRB secara statistik tidak signifikan dengan nilai probabilitas di atas taraf alpha (5%). Hasil dari estimasi dengan *Fixed Effect* menunjukkan nilai koefisien variabel belanja pegawai, belanja barang, dan belanja

modal, secara statistik signifikan dengan nilai probabilitas di bawah taraf alpha (5%). Sama halnya dengan *Random Effect Model*, bahwa koefisien variabel belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, secara statistik signifikan dengan nilai probabilitas di bawah taraf alpha (5%).

Tabel 4.7 Hasil Regresi Menggunakan Metode *Common Effect*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*

| Variabel | Common | | Fixed | | Random | |
|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | Koefisien | Prob. | Koefisien | Prob. | Koefisien | Prob. |
| C | 11408.90 | 0.0043 | 13199.64 | 0.0000 | 11408.90 | 0.0043 |
| BP? | 0.121046 | 0.0000 | 0.114097 | 0.0000 | 0.121046 | 0.0000 |
| BB? | 0.173260 | 0.0002 | 0.123640 | 0.0077 | 0.173260 | 0.0002 |
| BM? | -0.017650 | 0.3770 | -0.011377 | 0.6040 | -0.017650 | 0.3770 |

Sumber: Hasil Regresi Metode PLS, FEM, dan REM (data diolah)

4.2.1 Pemilihan Model Terbaik

4.2.1.1 Uji Chow (*Likelihood Ratio*)

Uji Chow bertujuan untuk mengetahui apakah model *Pooled Least Square* (PLS) atau *Fixed Effect Model* (FEM) yang akan dipilih untuk estimasi data. Uji ini disebut dengan *uji restricted F-test* atau *uji Chow (Likelihood Ratio)* atau *redundant test*.

Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Model *Pooled Least Square (Restricted)*

H_1 : Model *Fixed Effect (Unrestricted)*

Hasil *redundant test* F-hitung =178,096957, sedangkan nilai F-tabel dengan $df_1= 16$ $df_2= 51-4 =47$ dengan nilai F-tabel = 3,06 maka nilai F hitung > F-tabel (231,119239 > 3,06) menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima

sehingga, *Fixed Effect Models* (FEM) lebih baik dibandingkan *Pooled Least Square*. Berikut ini merupakan output dari uji menggunakan *Chow Test*.

Tabel 4.8 Hasil Regresi Menggunakan Uji Chow (Redundant Test)

| Test cross-section fixed effects | | | |
|----------------------------------|------------|---------|--------|
| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
| Cross-section F | 178.096957 | (16,31) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 231.119239 | 16 | 0.0000 |

Sumber: Output Eviews 9 (data diolah)

4.2.1.2 Uji Hausman

Hausman test ini bertujuan untuk membandingkan model *Fixed Effect* dengan *Random Effect* dalam menentukan model mana yang terbaik untuk digunakan sebagai Model Regresi Panel.

Hipotesis yang dibentuk dalam uji Hausman adalah sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Berikut merupakan output dari uji Hausman:

Tabel 4.9 Hasil Regresi Menggunakan Uji Hausman

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 45.318292 | 3 | 0.0000 |

Sumber: Output Eviews 9 (data diolah).

Berdasarkan Tabel 4.9, nilai Chi-Square hitung adalah 45.318292 dengan nilai $df = 3$ dengan nilai chi-square tabel adalah 7.81473 sehingga Chi-Square hitung $>$ Chi-Square tabel ($45.318292 > 7.81473$) menunjukkan bahwa H_0 ditolak,

maka *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model terbaik untuk digunakan dibandingkan *Random Effect Model* (REM).

Tabel 4.10 Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: PDRB?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 02/12/20 Time: 02:07
 Sample: 2016 2018
 Included observations: 3
 Cross-sections included: 17
 Total pool (balanced) observations: 51

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 13199.64 | 1709.072 | 7.723279 | 0.0000 |
| BP? | 0.114097 | 0.020277 | 5.626970 | 0.0000 |
| BB? | 0.123640 | 0.043349 | 2.852210 | 0.0077 |
| BM? | -0.011377 | 0.021713 | -0.523987 | 0.6040 |
| Fixed Effects (Cross) | | | | |
| _MUBA—C | 26400.06 | | | |
| _OKU—C | -10259.40 | | | |
| _MUARAENIM—C | 19551.99 | | | |
| _LAHAT—C | -9486.376 | | | |
| _MUSIRAWAS—C | -6789.653 | | | |
| _OKI—C | -499.1855 | | | |
| _BANYUASIN—C | -1648.799 | | | |
| _OKUTIMUR—C | -11055.20 | | | |
| _OKUSELATAN—C | -12699.51 | | | |
| _OGANILIR—C | -8992.933 | | | |
| _EMPATLAWANG--C | -12115.71 | | | |
| _PALI—C | -12945.07 | | | |
| _MURATARA—C | -10728.83 | | | |
| _PALEMBANG—C | 96280.38 | | | |
| _PRABUMULIH—C | -14236.26 | | | |
| _PAGARALAM—C | -16786.23 | | | |
| _LUBUKLINGGAU--C | -13989.28 | | | |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.997282 | Mean dependent var | 23004.31 |
| Adjusted R-squared | 0.995617 | S.D. dependent var | 31113.20 |
| S.E. of regression | 2059.883 | Akaike info criterion | 18.38516 |
| Sum squared resid | 1.32E+08 | Schwarz criterion | 19.14274 |
| Log likelihood | -448.8216 | Hannan-Quinn criter. | 18.67465 |
| F-statistic | 598.7408 | Durbin-Watson stat | 2.342711 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

Sumber: Output Eviews9 (data diolah).

Berdasarkan hasil kedua pengujian model Uji Chow dan Hausman didapatkan bahwa pengujian yang terakhir memilih FEM. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model terbaik untuk mengestimasi penelitian ini menggunakan estimasi *Fixed Effect Model* (FEM). Kondisi tersebut dijelaskan pada Tabel 4.10.

4.2.2 Analisis Individu

Analisis individu menunjukkan nilai intersep setiap kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Tabel 4.11 kabupaten/kota dengan nilai intersep tertinggi adalah Palembang yaitu sebesar 109.480. Selanjutnya diikuti oleh Musi Banyuasin dengan nilai intersep sebesar 39.559,7 dan Muara Enim sebesar 32.751,63.

Tabel 4.11 Nilai Intersep Setiap Individu (Kabupaten/Kota)

| No | Kabupaten /Kota | Nilai Intersep |
|----|---------------------------|----------------|
| 1 | Musi Banyuasin | 39.559,70 |
| 2 | Ogan Komering Ulu | 2.940,24 |
| 3 | Muara Enim | 32.751,63 |
| 4 | Lahat | 3.713,24 |
| 5 | Musi Rawas | 6.410,26 |
| 6 | Ogan Komering Ilir | 8.207,78 |
| 7 | Banyuasin | 12.700,45 |
| 8 | Ogan Komering Ulu Timur | 2.144,44 |
| 9 | Ogan Komering Ulu Selatan | 500,13 |
| 10 | Ogan Ilir | 4.206,70 |
| 11 | Empat Lawang | 1.083,93 |
| 12 | PALI | 254,57 |
| 13 | Musi Rawas Utara | 2.470,81 |
| 14 | Palembang | 109.480 |
| 15 | Prabumulih | -1.036,72 |
| 16 | Pagar Alam | -3.586,59 |
| 17 | Lubuklinggau | -789,64 |

Sumber: Hasil Regresi *Fixed Effect Model* (data diolah)

Palembang, Musi Banyuasin dan Muara Enim memiliki persentase PDRB yang tinggi, jika diasumsikan seluruh variabel dependen tidak berpengaruh maka ketiga daerah tersebut memiliki nilai PDRB yang tinggi yang dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kemudian dari 17 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan terdapat 3 kabupaten/kota yang memiliki nilai intersep negatif yaitu kabupaten/kota Prabumulih, Pagar Alam dan Lubuklinggau, artinya ketiga kabupaten/kota tersebut tidak mempengaruhi PDRB secara individu. Sedangkan, 14 kabupaten/kota lainnya memiliki intersep positif yang artinya 14 kabupaten/kota tersebut mempengaruhi PDRB secara individu.

4.2.3 Uji Statistik

4.2.3.1 Uji F (Uji Variabel secara Simultan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil regresi dari uji F sebesar 0.000000 yang berarti lebih besar dari derajat kesalahan sebesar 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel independen yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen, yaitu PDRB.

4.2.3.2 Uji t (Uji Variabel secara Parsial)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh pada variabel terikat atau mengetahui tingkat signifikansi

variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan angka probabilitas t-hitung terhadap tingkat signifikansi α (5% atau 0,05), dengan menentukan kriteria pengujian jika probabilitas t-hitung > probabilitas t-tabel maka pengaruh variabel independen itu signifikan, sehingga H_0 diterima.

Dari hasil tersebut, memiliki arti bahwa variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara individu, sebaliknya jika probabilitas t-hitung < probabilitas t-tabel maka berpengaruh signifikan, sehingga H_0 ditolak, berarti variabel independen dapat mempengaruhi secara individual variabel dependennya.

Tabel 4.12 Koefisien, t Hitung dan t Tabel dari Variabel Independen

| Variabel | Koefisien | t hitung | t Tabel | Keterangan |
|----------|-----------|----------|---------|------------------|
| BP | 0.237908 | 2.173833 | 1.67793 | Signifikan |
| BB | 1.112263 | 6.897290 | 1.67793 | Signifikan |
| BM | 0.022163 | 0.691748 | 1.67793 | Tidak Signifikan |

Sumber: Output Eviews 9 (data diolah)

Probability t hitung anggaran belanja pegawai adalah 2,173833 > 1,67793 yang artinya belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan secara individual. Kemudian *probability* t-hitung belanja barang sebesar 6,897290 > 1,67793 yang artinya belanja barang berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan secara individual. Sedangkan, *probability* t-hitung belanja modal sebesar 0,691748 < 1,67793 yang artinya bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan secara individual.

4.2.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel persamaan regresi hasil *Fixed Effect Model* menunjukkan hasil nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,997282. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel PDRB sebesar 99,72 persen dapat dijelaskan oleh belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Kemudian, sisanya sebesar 0,28 persen dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

4.2.4 Interpretasi Hasil dan Pembahasan

4.2.4.1 Pengaruh Belanja Pegawai terhadap PDRB

Berdasarkan hasil estimasi model yang ditunjukkan pada Tabel 4.10 dengan menggunakan persamaan regresi pada *Model Fixed Effect* nilai koefisien variabel belanja pegawai adalah 0.114097 artinya variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Apabila terjadi peningkatan belanja pegawai sebesar 1 milyar maka akan meningkatkan PDRB sebesar 11,4 milyar dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini sangat berkaitan dengan peranan pengeluaran pemerintah. Indonesia sebagai negara berkembang, maka komponen pengeluaran pemerintahnya signifikan.

Kemudian jika dikaitkan dengan teori Musgrave mengenai pengeluaran pemerintah. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GDP semakin besar dan persentasi investasi pemerintah dalam persentasi terhadap GNP akan semakin kecil.

Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow juga menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke

pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

Sejalan dengan penelitian Rekanaharto (2014) dan Hutabarat (2013) bahwa terhadap hubungan kuat antara belanja pegawai terhadap PDRB. Semakin tinggi nilai belanja pegawai menunjukkan pengeluaran pemerintah yang meningkat kemudian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa belanja pegawai mempengaruhi PDRB secara simultan dan parsial yaitu ditunjukkan dari hasil pengujian menggunakan eviews 9 dengan membandingkan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Sesuai dengan Tabel 1.3, porsi belanja pegawai yang tinggi pada tiap kabupaten/kota memberikan pengaruh pada PDRB di kabupaten/kota khususnya di Sumatera Selatan. Meskipun dinilai melakukan peningkatan pengeluaran anggaran, pemerintah di kabupaten/kota di Sumatera Selatan berharap jumlah yang besar ini mampu memberikan manfaat besar pada kinerja aparatur negara dalam meningkatkan pelayanan publik.

4.2.4.2 Pengaruh Belanja Barang Terhadap PDRB

Hasil estimasi persamaan regresi selama tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa pengaruh belanja barang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di kabupaten/kota Sumatera Selatan. Berdasarkan Tabel 4.10 nilai koefisien = 0,123640 artinya variabel belanja barang berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Apabila terjadi peningkatan pada belanja barang

sebesar 1 milyar maka akan meningkatkan PDRB sebesar 12,3 milyar dengan asumsi variabel lain konstan.

Belanja barang menjadi sorotan kedua setelah belanja pegawai, porsi yang cukup besar mampu mempengaruhi peningkatan belanja daerah yang akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan landasan teori tentang pengeluaran pemerintah yang menyatakan peranan pemerintah sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pada belanja barang, anggaran dialokasikan kepada pembayaran jasa dan pembelian perlengkapan pendukung kinerja perangkat pemerintahan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dijelaskan pada Tabel 1.4 belanja barang pada skala kabupaten/kota di tahun 2017 mengambil porsi sebesar 21,5 persen dari komponen belanja daerah dan meningkat di tahun 2018 menjadi 23,8 persen. Pada prakteknya, belanja barang digunakan untuk memenuhi seluruh keperluan perangkat kerja baik itu untuk membayar jasa profesi ataupun membeli barang-barang perlengkapan perangkat kerja pemerintah dan biaya operasional di tiap kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu belanja barang juga digunakan sebagai penunjang fasilitas pegawai. Harapannya dari jumlah belanja barang yang tinggi ini mampu menopang kinerja pegawai dalam menjalankan program pemerintah. Kemudian pembelian terhadap barang-barang modal dengan maksud untuk dihibahkan atau dijadikan bantuan sosial juga termasuk dalam belanja barang.

4.2.4.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap PDRB

Hasil estimasi persamaan regresi selama tahun pengamatan yaitu 2016-2018 menunjukkan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB di kabupaten/kota Sumatera Selatan. Berdasarkan Tabel 4.10 nilai koefisien sebesar -0.011377 , artinya variabel Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB. Apabila Belanja Modal meningkat sebesar 1 milyar maka akan menurunkan PDRB sebanyak 1,13 milyar dengan asumsi variabel lain konstan.

Menurut perkembangannya, belanja modal berbeda dengan belanja pegawai dan belanja barang yang terus menjadi sorotan dikarenakan porsinya yang besar. Pada belanja modal justru mengalami penurunan porsi meskipun untuk jumlahnya mengalami peningkatan. Porsi belanja modal pada tahun 2017 mencapai 21,6 persen. Namun, pada 2018 belanja modal mengalami penurunan sebanyak 1,2 persen. Hal ini dikarenakan alokasi dari pemerintah pusat untuk belanja modal mengalami penurunan. Padahal belanja modal merupakan faktor utama dalam rangka pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan IPM di Sumatera Selatan.

Penurunan jumlah belanja modal cenderung semakin menurun dikarenakan kebijakan desentralisasi, Sugiyanta (2016) hasil penelitiannya menjelaskan bahwa penyebab rendahnya jumlah belanja modal adalah desentralisasi, desentralisasi tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang lebih merata serta memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat.

Dengan adanya desentralisasi seharusnya daerah mendapat kewenangan luas untuk mengelolah berbagai sumber daya yang dimiliki dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang terus berkembang. Namun terjadi permasalahan terkait pemberlakuan desentralisasi khususnya di kabupaten/kota pembangunan infrastruktur masih tergolong rendah. Hendaknya pemerintah bisa meningkatkan pembangunan infrastruktur guna mendorong perkembangan wilayah yang seimbang.

Sejalan dengan hasil penelitian Darwanto dan Yulia (2007), Tuasikal (2008) dan Adiwiyana (2011) yang menyatakan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Terkait fenomena rendahnya porsi Belanja Modal pemerintah di beberapa kabupaten/kota terus berupaya mengoptimalkan alokasi Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dalam realisasi penggunaan Belanja Modal di tiap kabupaten/kota yang terus menerus menentukan prioritas dalam alokasi pembelanjaannya. Meskipun pada prakteknya belanja modal tidak terlalu mempertimbangkan PDRB sebagai salah satu determinan utama dalam alokasi belanja modal, karena rata-rata pemerintah daerah lebih mengutamakan transfer atau bantuan pemerintah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) ataupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dari 17 kabupaten/kota yang ada di provinsi Sumatera Selatan, nilai belanja modal memang berfluktuatif bahkan cenderung menurun di beberapa kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan. Hal inilah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Nilai belanja modal terendah adalah kabupaten Ogan Komering Ulu. Menurut BPS

Kabupaten Ogan Komering Ulu (2019), terdapat hal yang menyebabkan rendahnya jumlah belanja modal adalah letak geografis Ogan Komering Ulu yang masih rendah tingkat pembangunan infrastrukturnya.

Kemudian, menurut Statistik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (2019) jumlah PNS di kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 288 orang dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan banyak pegawai pensiun dan mutasi ke luar kabupaten yang jumlahnya tidak tergantikan oleh pegawai yang mutasi ke kabupaten Ogan Komering Ulu. Penurunan jumlah pegawai tersebut juga menyebabkan penurunan kinerja daerah yang berdampak pada sulitnya wilayah dalam melakukan penyerapan anggaran.

Di sisi lain, bila dikaitkan dengan sumber daya manusia di Ogan Komering Ulu yang berkompeten/ahli dibidangnya menyebabkan kurang maksimalnya penyerapan anggaran. Ogujiuba (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa alokasi anggaran belanja modal yang tinggi diharapkan mampu mengatasi kemiskinan apabila pelaksanaan mencapai target yang dianggarkan. Jika dikaitkan dengan IPM Ogan Komering Ulu pada tahun 2017 mencapai nilai sebesar 68,28 dan nilai ini merupakan nilai tertinggi di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan pada tahun tersebut.